

MILITER DAN POLITIK MASA ORDE BARU: KAJIAN HISTORIOGRAFI
BUKU KARYA HAROLD CROUCH MILITER DAN POLITIK
DI INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Sejarah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Progam Strata Satu (S1)*



OLEH :

IBNU HAFIZ MAULANA

18046152

DEPARTEMEN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

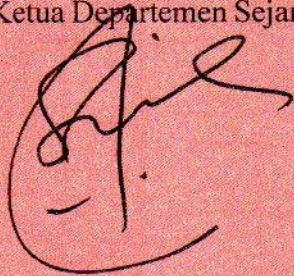
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

MILITER DAN POLITIK MASA ORDE BARU: KAJIAN HISTORIOGRAFI BUKU KARYA HAROLD CROUCH MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA

Nama : Ibnu Hafiz Maulana
NIM/BP : 18046152/2018
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

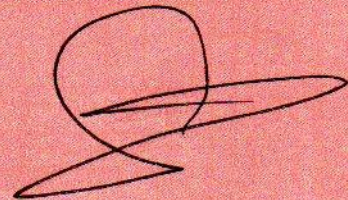
Padang, Desember 2024

Mengetahui
Ketua Departemen Sejarah



Dr. Aisiah, S.Pd, M.Pd.
NIP. 198106152005012002

Disetujui Oleh :
Pembimbing



Drs. Etmi Hardi, M.Hum.
NIP. 196703041993031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Departemen Sejarah
Universitas Negeri Padang

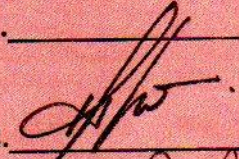
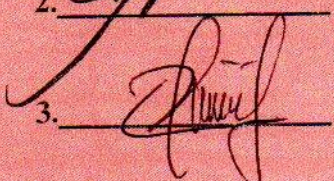
**MILITER DAN POLITIK MASA ORDE BARU: KAJIAN HISTORIOGRAFI
BUKU KARYA HAROLD CROUCH MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA**

Nama : Ibnu Hafiz Maulana
NIM/BP : 18046152/2018
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Desember 2024

Tim Penguji

	Nama
1. Ketua	: Drs. Etmi Hardi, M.Hum.
2. Anggota	: Dr. Hendra Naldi, SS, M.Hum.
3. Anggota	: Najmi SS, M.Hum.

	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Hafiz Maulana

BP/NIM : 2018/18046152

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul ***“Militer dan Politik Masa Orde Baru: Kajian Historiografi Buku Karya Harold Crouch Militer dan Politik di Indonesia”*** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,

Kepala Departemen Sejarah



Dr. Aisiah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198106152005012002

Saya menyatakan



Ibnu Hafiz Maulana
NIM. 18046152

ABSTRAK

Ibnu Hafiz Maulana (2018/18046152), Militer Dan Politik Masa Orde Baru: Kajian Historiografi Buku Karya Harold Crouch Militer Dan Politik Di Indonesia. **Skripsi** Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Militer dan Politik di Indonesia dalam buku karya Harold Crouch yang menjadi rujukan klasik dalam studi hubungan sipil-militer di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian historiografi kritis terhadap buku Crouch dengan fokus pada periode Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historiografi dengan menganalisis secara kritis buku Crouch dalam konteks perkembangan studi sejarah Indonesia. Metode yang digunakan meliputi analisis teks, kajian literatur: Melakukan kajian terhadap literatur yang relevan untuk memahami perkembangan diskursus mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku Crouch memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran militer dalam politik Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam analisis Crouch, seperti fokus yang terlalu kuat pada peran militer, Crouch cenderung mengutamakan peran militer dalam menjelaskan dinamika politik, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang juga penting. Penggunaan konsep dwifungsi ABRI yang terlalu sempit, Crouch cenderung melihat dwifungsi ABRI sebagai penyebab utama dominasi militer dalam politik tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan multidimensi konsep ini. Kurangnya perhatian terhadap perspektif aktor non-militer, Crouch kurang memberikan perhatian pada perspektif aktor sipil dan kelompok masyarakat dalam menjelaskan dinamika politik.

Kata Kunci: Historiografi, Harold Crouch, Sejarah Militer, Orde Baru

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul “Militer Dan Politik Masa Orde Baru: Kajian Historiografi Buku Karya Harold Crouch Militer Dan Politik Di Indonesia”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Program Pendidikan Sejarah.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan moril serta material dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rudi Hendri dan Ibu Faddiriyati, kakak tersayang Soraya Salma Zahira dan adik tercinta Gufran Mufadal Nazif, serta keluarga besar atas setiap cinta semangat, suport, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang dan doa terbaik untuk penulis.
2. Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan sekaligus selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang sangat berguna demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Ibu Najmi SS, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis serta selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang sangat berguna demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Hendra Naldi, SS, M. Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang sangat berguna demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Kepada staf TU jurusan sejarah serta staf labor yang telah membantu penulis dalam melancarkan urusan penulis dalam hal surat menyurat dan labor untuk membuat
7. Komting 18, Bang Albert yang banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Paiki, Arab, dan Wahyu, sahabat yang selalu menemani dan mendukung penulis
9. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Sejarah terkhusus teman-teman angkatan 2018 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga pahala yang telah dilakukan menjadi amal ibadah dan diberi balasan pahala berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan dibuatnya penelitian ini, penulis berharap semoga dapat berguna bagi kita semua, terutama untuk menambah pengetahuan mengenai Militer dan Politik Masa Orde Baru. Penulis menyadari

adanya keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman sehingga masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki maupun menambah data baru agar penelitian ini menjadi lebih baik dan berkembang.

Padang,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
1) Studi Relevan	13
2) Kerangka Konseptual.....	16
3) Kerangka Berfikir.....	22
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II PENULISAN DAN KARYA.....	28
A. Latar Belakang Harold Crouch dan Karyanya	28
B. Tinjauan Singkat Karya Harold Crouch.....	36
BAB III GAMBARAN MILITER DAN POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU DALAM KARYA HAROLD CROUCH: MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA	40
A. Militer dan Politik Pada Masa Orde Baru	40
B. Pandangan Harold Crouch terhadap Militer dan Politik pada Masa Orde Baru	45
1) Dominasi Militer	46
2) Militarisasi Sipil	54
3) Intervensi Politik	56
4) Korupsi dan Ekonomi	63
5) Perubahan Politik	67
C. Analisis Karya Harold Crouch	70
1) Pengaruh Zeitgeist.....	71
2) Pengaruh Sosial Budaya.....	74
BAB IV KESIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rezim Orde Baru dapat dikatakan sebagai era kemenangan militer karena peranannya menjadi sangat besar. ABRI (yang kemudian berubah menjadi TNI) mengintervensi politik sipil melalui doktrin dwifungsi. Dengan doktrin ini, militer memperoleh legitimasi untuk masuk ke ranah politik sipil, antara lain dengan menempatkan tenaga militer yang aktif ataupun pensiunan di MPR, DPR, DPRD, eksekutif, dan staf pemerintah pusat ataupun daerah. Sejumlah lembaga negara penting, seperti Depdagri selalu dipegang ABRI. Pada tahun 1996 seperempat jabatan setingkat kabinet, termasuk Menteri Agama dan jumlah besar eselon II dipegang oleh perwira yang masih dinas atau sudah pensiun. ABRI juga melakukan kontrol terhadap Golkar, mengawasi penduduk melalui komando teritorial.¹

Cikal bakal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sendiri lahir pada 22 Agustus 1945, ketika PPKI mengumumkan terbentuknya sebuah Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tekat laskar rakyat untuk menolak Belanda menginjak kakinya di Indonesia telah menyadarkan pimpinan sipil untuk membentuk tentara nasional. Demikian pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR

¹ Donald K. Emmerson, ed., *Indonesia Beyond Soerharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*, (Jakarta: Gramedia-Asia Foundation Indonesia, 2001), h. 73-78.

diubah menjadi TKR. Tahap ini masih berfungsi sebagai penjaga keamanan dalam negeri bukan menghadapi musuh dari luar. Statusnya ditingkatkan lagi dari badan menjadi tentara.

Tentara Nasional Indonesia pada masa Orde Baru sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI terdiri dari unsur angkatan perang dan Polri. Sebelumnya, masih menjadi perdebatan kapan militer mulai masuk ke dunia politik karena mengingat mereka lahir dari revolusi kemerdekaan sehingga ada anggapan bahwa mereka sudah berpolitik sejak awal.

Kekuatan militer dalam dunia politik di Indonesia, mempunyai akar sejarah yang panjang dan tidak bisa dihapus begitu saja, bahkan akan menjadi sesuatu yang musykil. Pada era reformasi, saat partai-partai politik bermunculan, ternyata partai-partai politik mengundang militer masuk di dalamnya. Dianggapnya partai politik akan menjadi kuat bila ada militernya, apalagi yang sudah berpangkat jenderal. Akibatnya, hampir tidak ada satu partai pun yang di dalamnya tidak ada militernya.

Dari peristiwa tersebut, sejarawan menjadi orang yang berperan penting dalam penulisan peristiwa-peristiwa masa silam melalui berbagai fakta yang ada. Tanpa melihat fakta-fakta sejarah, seorang sejarawan tidak mungkin dapat merekonstruksi sejarah yang telah terjadi. Fakta inilah yang memungkinkan seorang sejarawan mengungkapkan sejarah.

Menurut Harold Crouch, sejak lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memang telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan militer

maupun politik. Di mana dalam sebahagian sejarahnya ABRI telah memainkan peran politik yang penting. Selama beberapa tahun setelah kemerdekaan, ABRI menganggap dirinya sebagai pelindung. Di kemudian hari lebih menegaskan haknya untuk berperan secara tetap dalam kehidupan politik. Pemahaman ABRI tentang dirinya sebagai kekuatan non politik tidak berlangsung lama, dan segera ditarik kembali ke arena politik, bukan terutama karena ambisi politik para perwira mereka, atau karena pandangan dangkal para politisi (sipil), tetapi semata-mata karena keadaan politik yang memang telah runyam, dan telah menghasilkan suatu struktur kekuasaan yang tidak menentu, sehingga tidak mungkin membiarkan tentara/ABRI memencilkan diri dari kancah kehidupan politik.²

Harold Crouch adalah seorang ilmuwan dan akademisi politik Australia yang fokus pada studi politik Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Meskipun ia mungkin tidak dikenal secara luas sebagai tokoh sejarah, ia dikenal karena kontribusinya dalam memahami perkembangan politik di wilayah Indonesia. Harold Crouch telah dikaitkan dengan institusi akademis dan pusat penelitian, di mana dia telah melakukan penelitian ekstensif mengenai dinamika politik, konflik, dan pemerintahan di Indonesia. Karyanya sering kali melibatkan analisis struktur politik, dinamika kekuasaan, dan dampak perubahan politik terhadap negara.

² Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.

Sementara itu, selama periode 1966 hingga 1998 di Indonesia, yang mencakup era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Suharto, terdapat sejarawan Indonesia yang menulis tentang masalah militer dan politik. Penting untuk dicatat bahwa selama periode ini, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, dan beberapa pakar menghadapi tantangan ketika mengungkapkan pandangan berbeda. Meski demikian, sejumlah akademisi dan intelektual Indonesia berkontribusi dalam memahami dinamika politik dan peran militer. Berikut adalah beberapa sejarawan Indonesia yang menulis mengenai hal ini banyak diantaranya yang mengagungkan masa pemerintahan Orde Baru, tidak seperti Harold Croug yang mengkritisnya, diantaranya adalah Soedjatmoko yang menulis tentang filsafat politik, nasionalisme, dan tantangan yang dihadapi Indonesia, Yahya Muhaimin dengan bukunya *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966*, Arief Budiman dengan karya-karyanya, termasuk “*Intelektual dan Nasionalisme di Indonesia: Kajian tentang Pengikut yang Direkrut Sutan Sjahrir di Jakarta yang Diduduki*”.

Nugroho Notosusanto juga merupakan salah satu yang mengagungkan pemerintahan Orde baru, sebagai sastrawan dan pengarang juga menulis sejarah menurut versi militer, yang kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1984, Nugroho memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menulis ulang kurikulum sejarah agar lebih menekankan pada peranan historis militer. Pada tahun itu, Nugroho juga menulis skenario film *Penghiatus G30S/PKI*, yang juga memuat tragedi tersebut versi resmi Orde Baru. Film ini kemudian menjadi acara

wajib bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia dan kemudian ditayangkan sebagai acara rutin setiap tahun di saluran televisi nasional.

Juwono Sudarsono, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1998-1999, menginisiasi penulisan sejarah versi baru yang artinya Nugroho tak lagi jadi rujukan. Selain itu muncul desakan masyarakat agar buku sejarah versi pemerintah yang baru turut menyertakan kronologi tumbangnya Rezim Soeharto.

Karya ilmiah sejarah harus dilandasi data/fakta peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya. Kesan-kesan (bekas-bekas) merupakan fakta-fakta yang dapat ditangkap manusia, dan sejumlah fakta yang tersusun rapi dengan tafsiran tertentu adalah cerita sejarah.³ Sistem tafsiran atau hubungan antar fakta tergantung dari kepribadian pembuat cerita.⁴

Tanpa mengabaikan keterlibatan dan peran kalangan ilmuwan atau para akademisi, sesungguhnya ada dua pihak yang menonjol perannya dalam pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang banyak digunakan, pengalaman sebagai sumber pengetahuan memiliki keterbatasan, antara lain pengalaman tergantung orang (subyek) yang mengalami, setiap orang berbeda, maka bersifat subyektif serta tidak semua hal dapat dialami.⁵

³ Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 257

⁴ *Ibid.*, h. 259

⁵ Soegeng Ysh, *Prosedur dan Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2016), h.4

Pada awal reformasi, banyak upaya untuk menulis ulang sejarah. Masing-masing mempunyai visi tersendiri mengenai apa yang harus ditekankan dan apa yang harus dihilangkan. Masa pasca Orde Baru dengan desentralisasi sebagai poros utamanya, membuka peluang bagi beragam kelompok yang mewakili pihak-pihak yang dibungkam pada masa lalu untuk menyelidiki berbagai sejarah didalam historiografi yang sudah dipisahkan dari pusat.⁶

Tulisan mengenai peran politik militer terus berkembang sesuai zamannya, bahkan militer pada masa Orde Baru berdampak pada subordinasi seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat pada negara yang sudah diidentifikasi dengan kekuasaan militer. Dalam konsep ini sulit dibedakan mana militer yang merupakan bagian dari negara dengan militer yang dikuasai negara. Kosepsi kenegaraan seperti itu akan membenarkan militer untuk berperan atas nama negara dan rakyat sekaligus.

Meski sudah banyak penelitian dan publikasi terkait peranan militer ada masa orde baru, namun ternyata masih menyisakan ruang untuk penelitian baru. Berbagai penelitian peranan militer baik ditulis oleh ahli sejarawan maupun amatir pada umumnya hanya memusatkan pada dimensi konflik berkisar pada persoalan peristiwa-peristiwa yang melibatkan tragedi kemanusiaan, yang dalam hal ini dimensi kemanusiaan hak azasi manusia. Adapun dimensi lain, seperti persoalan politik, sosial, maupun ekonomi jarang disentuh. Sementara itu, pada

⁶ Henk Schulte Nordholt, et.al, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.3

masa Orde Baru bukan hanya ada peristiwa-peristiwa tragedi kemanusiaan, akan tetapi militer mempunyai peranan dan fungsi yang menyimpan sumber kisah yang luas.

Harold Crouch adalah pengamat militer-politik Indonesia dari Australia, Crouch pertama kali tiba di Indonesia tahun 1968. Pada saat itu, militer telah mengambil alih kekuasaan, dan Soeharto dilantik sebagai presiden. Saat mengajar di Universitas Indonesia, Harold bertemu dengan banyak tokoh politik dan militer, dan dia mulai tertarik untuk menulis tentang peran politik para jenderal di Indonesia.

Dalam penelitiannya, Crouch mengatakan bahwa militer tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer semata. Buku yang dipilah dalam 13 bab itu membelegiti peran militer, tentu saja yang dimaksud angkatan darat/ABRI, dalam politik sejak kemerdekaan lengkap dengan koneksi bisnisnya. Kala itu adalah hal terlarang membicarakan militer dalam gurita bisnis di Indonesia.

Tulisannya bercirikan penelitian, analisis, dan perspektif akademis yang cermat mengenai perkembangan politik, institusi, dan pemerintahan di Indonesia. Karya-karya ilmuwan politik seperti Crouch berkontribusi pada pemahaman akademis tentang dinamika politik negara-negara yang mereka pelajari. Buku-buku ini sering digunakan sebagai sumber akademis dan referensi oleh mahasiswa, peneliti, dan cendekiawan yang tertarik dengan politik Indonesia.

Meskipun istilah "karya ilmiah" terkadang dikaitkan dengan penelitian dan eksperimen empiris, dalam konteks ilmu sosial seperti ilmu politik, istilah ini digunakan secara luas untuk menggambarkan penyelidikan sistematis dan ilmiah terhadap fenomena sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, karya-karya ilmuwan politik seperti Harold Crouch memang dianggap ilmiah dalam konteks penelitian dan analisis akademis.

Tulisan Crouch menawarkan perspektif sejarah yang penting untuk memahami evolusi institusi politik dan struktur kekuasaan di Indonesia. Analisisnya seringkali mencakup periode-periode yang signifikan, sehingga memberikan pembaca pandangan komprehensif tentang perkembangan politik.

Crouch mengkaji konteks sejarah dan politik di mana militer Indonesia memainkan peran penting. Hal ini mencakup diskusi mengenai keterlibatan militer dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Kemudian membahas peran militer dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, terutama pada saat terjadi kerusuhan politik. Crouch juga mengeksplorasi bagaimana militer memandang dirinya sebagai penjaga negara, menyelidiki kepentingan ekonomi militer dan potensi keterlibatannya dalam korupsi, serta Crouch membahas hubungan antara otoritas militer dan sipil, termasuk pengaruh militer dalam berbagai skenario politik.

Buku tersebut tentu saja dilarang pada masa Orde Baru, namun banyak peneliti Indonesia (dan juga beberapa jenderal) yang berhasil memperolehnya di luar negeri, dan salinannya beredar secara luas di Indonesia. Meski Orde Baru

masih berkuasa, mereka cukup terbuka terhadap Crouch mengenai gagasannya di kalangan militer

Perubahan zaman akan memunculkan jiwa zaman, dalam hal ini sejalan dengan apa yang disebut historiografi itu mewakili jiwa zamannya dan kehidupan kebudayaan pada zamannya. Penulisan militer dan politik di Indonesia oleh Harold Crouch berfokus pada peranan politik angkatan bersenjata. Harold Crouch adalah spesialis yang berkualitas dalam bidang sejarah militer.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian historiografi Karya Harold Crouch tentang Militer dan Politik di Indonesia judul penelitian **“MILITER DAN POLITIK MASA ORDE BARU: KAJIAN HISTORIOGRAFI BUKU KARYA HAROLD CROUCH MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, agar pembahasan penelitian lebih terarah, jelas dan mudah untuk dipahami penulis akan merumuskan masalah mengenai peran politik serta militer yang dijalankan oleh kelompok elit militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya angkatan darat.

Sebagaimana layaknya kajian historiografi, perhatian skripsi ini dipusatkan pada Karya Harold Crouch tentang Militer dan Politik di Indonesia. Studi historiografi mengkaji apa yang ditulis atau dikatakan oleh penulisnya, kapan ditulis, siapa yang menulis, mengapa ditulis, dan untuk tujuan apa ditulis,

tanpa harus mengevaluasi peristiwa-peristiwa dalam karya tersebut benar atau salah.⁷

Berangkat dari permasalahan itu, penelitian ini selanjutnya menjawab pertanyaan yang diharapkan mengarahkan dan membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan itu, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan Harold Crouch terhadap militer dan politik pada masa Orde Baru dalam bukunya?
2. Apakah ada pengaruh *zeitgeist* terhadap penggambaran militer dan politik dimasa Orde Baru yang mempengaruhi Harold Crouch dalam menulis buku ini?
3. Apakah karya Harold Crouch dipengaruhi sosial dan budaya pada masa itu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis gambaran militer dan politik pada masa pemerintahan orde baru yang dilukiskan dalam Buku Militer dan Politik di Indonesia Karya Harold Crouch.
2. Menganalisis pandangan Harold Crouch terhadap militer dan politik pada masa Orde Baru dalam bukunya.

⁷ Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi*, (Padang: Universitas Andalas, 1984), h. 16.

3. Menganalisis jiwa zaman, latar belakang budaya yang mempengaruhi Harold Crouch dalam menghasilkan karyanya tentang militer dan politik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan maupun praktis:

1. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan penulis terhadap militer dan politik pada masa pemerintahan Orde Baru
 - b. Mengembangkan kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah dengan menganalisis, khususnya dalam kajian historiografi.
2. Manfaat Akademis
 - a. Manfaat penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya
 - b. Sebagai tambahan literatur kepustakaan ilmu sosial Universitas Negeri Padang
 - c. Memperkaya khasanah perpustakaan sejarah lokal.
3. Manfaat teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu sejarah, khususnya dalam mengkaji militer dan politik pemerintahan orde baru serta peran Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) terhadap politik Indonesia dalam Buku Militer dan Politik Di Indonesia Karya Harold Crouch

- b. Menambah literatur sejarah dan memberikan informasi bagi masyarakat ilmiah yang ingin mendalami penulisan tentang militer dan politik di masa pemerintahan orde baru pada masa yang akan datang

E. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Pertama, penelitian oleh Anwar dengan judul penelitian “Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia”, pada tahun 2018.⁸ Penelitian ini mengkaji akar sejarah munculnya keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam bidang sosial politik, terutama beberapa alasan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk melibatkan ABRI dalam bidang sosial politik dan ekonomi, serta upaya kalangan ABRI sendiri untuk dapat ikut berperan dalam bidang tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ABRI dalam bidang sosial politik di Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Secara politis, alasan Soekarno memasukkan kalangan militer dalam struktur pemerintahannya, yaitu kegagalan politisi sipil dalam merumuskan ideologi negara yang tidak ada kesepakatan antar partai dalam sidang konstituante. Kegagalan ini dianggap membahayakan stabilitas politik nasional dan mengancam

⁸ Anwar, “Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia”, dalam *ADABIYA*, Volume 20., No. 1., Februari, (2018).

keutuhan Negara. Seiring dengan keterlibatannya dalam bidang sosial politik, ABRI juga berperan dalam sosial ekonomi.

Kedua, penelitian oleh Alphonsius Rodriquest Eko, Kurniawati, M. Hasmi Yanuardi dan Maulani pada tahun 2020. Dengan judul penelitian “Dwi Fungsi ABRI dalam Konflik Internal PDI 1976-1998”.⁹ Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan konsep Dwifungsi ABRI dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penelitian bertujuan untuk mengetahui keterlibatan militer dalam konflik internal PDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terlibatnya militer dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia tidak lepas peran Jenderal A.H.Nasution. Puncak dari campur tangan ABRI dalam konflik internal PDI adalah dengan terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. Konflik yang melibatkan DPP PDI Megawati dan DPP PDI Soerjadi ini diduga juga melibatkan pihak eksternal partai, khususnya pemerintah dan ABRI. Dampak dari Peristiwa 27 Juli 1996 dirasakan semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, ABRI, PDI dan bahkan masyarakat.

Ketiga, penelitian oleh Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana dengan judul “Dwifungsi ABRI Dari Masa ke Masa”, tahun 2021.¹⁰ Penelitian ini terfokus pada penelusuran sejarah Dwifungsi TNI dari masa ke masa kemudian menguraikan bagaimana militer bisa memutuskan untuk

⁹ Alphonsius Rodriquest Eko, *et.al*, “Dwi Fungsi ABRI dalam Konflik Internal PDI 1976-1998” dalam *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 9., No. 2., (2020)

¹⁰ Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryanan, “Dwifungsi TNI Dari Masa ke Masa”, dalam *Jurnal Academia Praja*, Volume 4., No.1., Februari., (2021).

melakukan reformasi atas tubuhnya sendiri, dan sesudah itu apakah peran politik militer berhasil dihapuskan dalam kehidupan politik Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa a Dwifungsi angkatan bersenjata di Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orba runtuh pada 1998, dengan krisis moneter akut yang menyertainya, masyarakat Indonesia menuntut negara ini menjadi demokratis seutuhnya. Akibatnya, Dwifungsi ABRI pun ditinggalkan. Namun, upaya untuk mengembalikan Dwifungsi tetaplah kuat.

Keempat, penelitian oleh Bagus Fuji Panuntun, dengan judul penelitian “Pengaruh Militer pada Sejarah Nasional Indonesia: Studi Historiografi Terhadap Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Karya Nugroho Notosusanto”, tahun 2022.¹¹ Penelitian ini berfokus kepada pengaruh militer di Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Jilid VI yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Narasi sejarah yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto terkhusus pembahasannya mengenai peristiwa ‘65’, dengan dan tanpa disadari telah menjadi dokumen legal terhadap pembunuhan masal tahun 1965, legitimasi atas kekuasaan militer selama 32 tahun, dan menjadi katalis produk-produk

¹¹ Bagus Fuji Panuntun, *Pengaruh Militer pada Sejarah Nasional Indonesia: Studi Historiografi Terhadap Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Karya Nugroho Notosusanto*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

kebudayaan lain yang bernafas sama; untuk merawat kebencian dan melanggengkan pemerintahan militer-otoriter Soeharto.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Jiwa Zaman (Zeitgeist)

Salah satu prinsip yang dapat dijadikan pegangan sejarawan adalah setiap karya selalu mencerminkan zeitgeistnya (jiwa zamannya).¹² Zeitgeist diasosiasikan dengan *History of Philosophy* oleh Georg Hegel, Hegel berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melompati masanya sendiri, jiwa pemikiran pada zamannya juga merupakan jiwanya sendiri.¹³

Leovold von Ranke menulis *Modern Historical Writers*, Ranke menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi, *wie es eigentlich gewesen*, sebab setiap priode sejarah itu akan dipengaruhi oleh semangat zamannya (Zeitgeist).¹⁴ Dalam memformulasikan ilmu sejarah seperti apa adanya melalui dokumen tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan yang memisahkan antara teori dan kepentingan *praxis*.¹⁵ Karena bagi seorang

¹² Kartodirdjo, Sartono. T.t. “Beberapa Persoalan Sekitar Sejarah Indonesia & Segi-segi Struktural Historiografi Indonesia”. Lembaran Sejarah, UGM dalam Nina H. Lubis, “Kontroversi Tentang Naskah Wangsakerta”, volume 14., No. 1., (2002), h. 24

¹³ Glenn Alexander Magee. *Zeitgeist, The Hegel Dictionary*, (Continuum International Publishing Group, 2011), h. 262

¹⁴ Leovold von Ranke dalam Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), h. 90

¹⁵ Budi Hardiman Francisco. *Kritik Idiologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. (Yogyakarta : Buku Baik : 2003)., h. 90

sejarawan situasi zaman (*zeitgeist*) dan lingkungan kebudayaan akan mempengaruhi cara pandang sejarawan tersebut. Singkatnya, situasi zaman dan kebudayaan diwakili dengan pandangan seorang sejarawan.

Sejarah merupakan rekonstruksi suatu kejadian dimasa lalu dalam konteks waktu tertentu, yang tentunya berbeda dengan konteks waktu yang lain walaupun dalam ruang yang sama. Dalam hal ini Kuntowijoyo percaya bahwa setiap kejadian tersebut hanya satu-satunya terjadi, oleh karenanya sejarawan perlu untuk mengangkat peristiwa yang sekiranya menarik dan mempunyai makna tersebut secara mendetail dan terperinci agar peristiwa yang ada serta *zeitgeist* atau semangat zaman yang melingkupinya dapat terekonstruksi dengan baik dalam sebuah tulisan.¹⁶

b. Militer

Militer berasal dari bahasa Yunani “*Milies*”, yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹⁷ Dalam bahasa Prancis dikatakan sebagai “*militair*” adalah

¹⁶ Aditia Muara P, *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*, (Gresik: JSI Press, 2020), (h)

¹⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006),

oknum/*person* atau orang seorang yang bertugas untuk memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan.¹⁸

Di Indonesia, adapun pengertian militer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yaitu, militer merupakan anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam perundang-undangan dibedakan 2 macam militer, yaitu militer sukarela dan militer wajib. Militer sukarela adalah seseorang yang berstatus militer dikarenakan menandatangani surat ikatan dinas untuk masa atau waktu tertentu, sedangkan militer wajib (milwa) atau militer darurat yaitu seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh Komandan Kesatuan. Dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka, maka dibolehkan bagi rakyat untuk turut “angkat senjata”, asal memenuhi ketentuan yang berlaku, mereka disebut sebagai sukarelawan militer.²⁰

¹⁸ Brigjen TNI Markoni, “Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel Dan Pembinaan Satuan”, dalam *Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Volume 2., No.1., (2014), h.9

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 Ayat (1)

²⁰ Elmarianti Saalino, *Hukum Militer di Indonesia*, (Ponorogo: Uwaus Inspirasi Indonesia, 2019), h. 3

Di Indonesia, semasa perang kemerdekaan tidak ada kesempatan bagi militer untuk membangun profesionalisme militer karena sibuk melakukan perang melawan penjajah. Profesionalisme militer terbagi dua, yaitu profesionalisme lama mengenai pertahanan (ke luar) dan profesionalisme baru mengenai keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional, yang menjurus pada peran militer yang melebar luas dalam politik.²¹

Campur tangan militer dalam urusan politik bertentangan dengan profesionalisme itu sendiri, di dalam kehidupan militer ada aturan yang harus dipatuhi yakni hierarki dan komando dari atas. Hal ini bertentangan dengan demokrasi yang harus menyerap aspirasi rakyat dari bawah. Simatupang menyatakan:²²

Perwira sudah terbiasa pada jalannya perintah dari atas kebawah. Jika memikirkan soal-soal politik dengan tidak mempunyai bekal lain kecuali pengalaman militer maka tidak mengherankan kalau ada yang mempunyai banyak simpati terhadap bentuk pemerintahan dimana orang yang mengatur segala sesuatu dari atas kebawah.

Politik Indonesia pasca kemerdekaan sampai sekarang dipegang oleh dua kelompok elit, sipil dan militer. Politisi sipil mulai dominan sejak tahun 1945 sampai tahun 1965, sementara politisi militer sejak tahun 1966 sampai pertengahan tahun 1998 atau selama Orde Baru.

²¹ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: LKiS, 2005) h. 13

²² Simatupang, *Pelopop Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), h.161

Suasana politik pemerintahan orde baru yang didominasi oleh militer adalah pendekatan *top down* yang bertentangan dengan prinsip partisipasi politik dari bawah dalam demokrasi.²³

Sebuah hal yang menakjubkan bahwa militer telah merasuk kesegala lini birokrasi elit negara. Lebih menakjubkan lagi bahwa peran militer didalamnya mayoritas terdiri atas unsur Angkatan Darat (TNI-AD). Adalah hal yang lumrah jika suatu negara memiliki angkatan perang dengan unsur Darat, Laut dan Udara ditambah organisasi militer dengan tugas pokok keamanan yang dinamakan Polisi, baik sebagai bagian Darat maupun Laut. Pada perkembangannya di masa Orde Baru, Angkatan Daratlah yang paling mendominasi dalam pemerintahan sipil ataupun militer itu sendiri. Namun bukan berarti hal tersebut dimulai pada masa Orde Baru. Ada beberapa alasan historis yang mengantarkan bentuk pemerintahan militeristik seperti itu.

Pada tahun 1966, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet dan 11 anggota militer yang menempati jabatan strategis di departemen-departemen urusan sipil. Di DPR, sebanyak 75 anggota militer duduk mewakili militer. Di tingkat daerah, pada tahun 1968, sebanyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada tahun 1970. Sementara, pada tahun 1968, terdapat sebanyak 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer.

²³ *Ibid.*

Kemudian pada tahun 1973, jumlah militer yang menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia dijabat oleh militer.²⁴

Tahun 1982, sebanyak 89% jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh anggota militer. Kemudian pasca pemilu 1987, sebanyak 80% anggota DPR dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui Fraksi Golkar. Kemudian, 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal di militer. Jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100. Kenaikan ini dianggap tidak layak, karena jumlah ABRI hanya 500.000 orang (0,3% dari jumlah penduduk Indonesia) tetapi mendapatkan kursi 20% di parlemen.²⁵

Puncak kejayaan militer di bidang politik terjadi pada 1900-an, saat ABRI memegang peranan penting di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, hingga menjadi menteri di kabinet Soeharto.

c. Historiografi

Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *histori* yang berarti sejarah dan *grafi* memiliki arti

²⁴ Cholisin (2002) dan Pakpahan (1994) sebagaimana dikutip Budi Winamo, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008) h. 38

²⁵ *Ibid.*

deskripsi/penulisan.²⁶ Kata Historia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kata “historia” dipakai untuk pemaparan mengenai tindakan–tindakan manusia yang bersifat kronologis terjadi di masa lampau.²⁷

Penulisan sejarah adalah puncak segala sesuatu. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah sebagai *historie-recite*, sejarah sebagaimana dikisahkan yang mencoba mengangkat dan memahami *historie – realitie*, sejarah sebagaimana terjadinya. Dan hasil penulisan inilah yang disebut historiografi.²⁸

Historiografi sebagai penulisan sejarah, yang didahului oleh penelitian (analisis) terhadap peristiwa-peristiwa di masa lampau. Penelitian dan penulisan sejarah itu berkaitan pula dengan latar belakang teoritis, latar belakang wawasan, latar belakang metodologis penulisan sejarah, latar belakang sejarawan/penulis sumber sejarah, aliran penulisan sejarah, dan lain sebagainya.

Studi historiografi memfokuskan pusat perhatian analisisnya pada biografi penulis, latar belakang kehidupan, lingkungan sosial

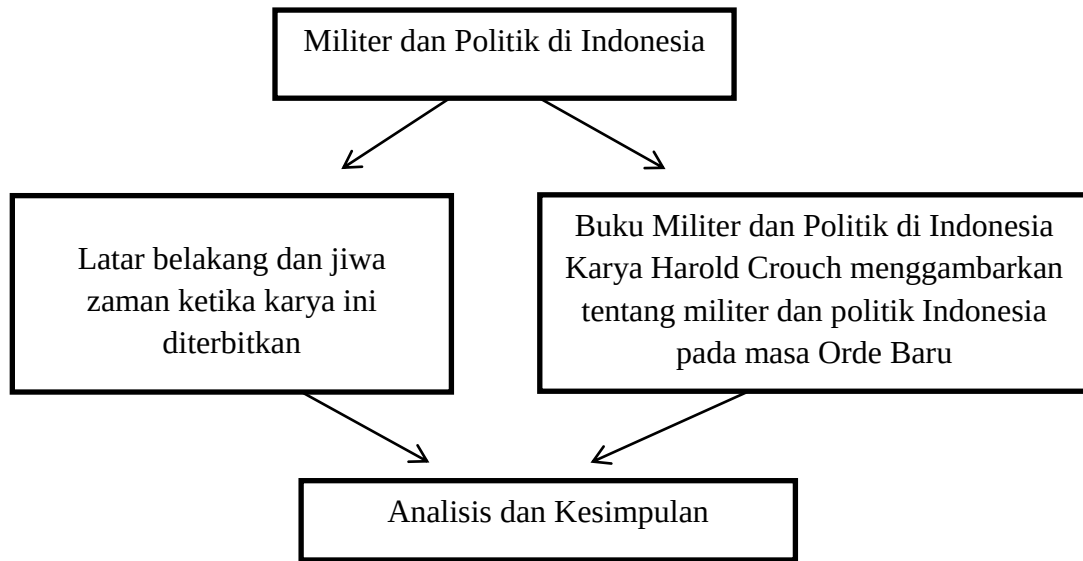
²⁶ Badri Yatim, *Historiografi Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1.

²⁷ Nina Herlina Lubis, *Historiografi Barat*, (Bandung:Satya Historika, 2000), h. 11.

²⁸ Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Garmedia, 1985), hlm. xv

budaya, intelektulitasnya dan pengaruhnya terhadap ragam corak, isi dari historiografi yang dihasilkannya.²⁹

3. Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2024

F. Metode Penelitian

Menurut Louis Gotschalk metode penelitian ilmu sejarah terdiri dari empat tahap. Diantaranya ialah heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.³⁰ Pada penelitian historiografi ini termasuk penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan.³¹ Adapun tahapan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

²⁹ Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi*, (Padang: Universitas Andalas, 1984), h.16

³⁰ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah* terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), h.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004),

Dalam tahap mencari dan mengumpulkan sumber ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.³²

Tahap ini Penulis mencari dan menemukan sumber mengenai historiografi maupun mengenai literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini, latar belakang Penulis karya dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Sumber dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah Buku Militer dan Politik di Indonesia Karya Harold Crouch, sedangkan sumber sekunder dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan militer dan politik pada masa pemerintahan orde baru ataupun pendapat penulis lain terkait Harold Crouch. Bahan sumber juga ditemukan dalam bentuk jurnal, artikel, skripsi, ataupun tesis. Selain itu turut mengumpulkan bahan terkait kajian-kajian historiografi.

Dalam studi kepustakaan terdapat 4 langkah penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya³³:

- a. Mempersiapkan perlengkapan penelitian

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 308

³³ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.16

Pada tahap ini, hal yang penulis lakukan adalah mempersiapkan berbagai alat tulis seperti buku catatan, pena atau pensil dan lainnya. Benda-benda tersebut digunakan untuk mencatat data-data yang penulis temukan di perpustakaan.

b. Membuat Bibliografi Kerja

Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan beberapa karya terkait sebelum, saat dan setelah pemerintahan orde baru. Karya-karya terkait tersebut bisa penulis dapatkan secara langsung di perpustakaan ataupun secara online berupa *soft file*. Setelah karya-karya tersebut terkumpul, selanjutnya penulis akan mengelompokkannya berdasarkan kepentingan data.

c. Mengatur Waktu

Pengaturan waktu penulis dalam pengerjaan penelitian ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. Untuk tempat pengerjaannya, pada hari-hari kerja penulis akan melakukan penelitian di kampus seperti perpustakaan pusat atau labor sejarah Universitas Negeri Padang. Sedangkan pada hari libur penulis melanjutkan pengerjaan penelitian di rumah maupun tempat-tempat umum.

d. Membuat Catatan Penelitian

Pada tahap ini penulis mulai melakukan analisis terhadap Buku Militer dan Politik di Indonesia Karya Harold Crouch serta karya-karya sejarah lainnya yang terkait. Kegiatan analisis dan penafsiran ini

dilakukan untuk mengetahui apakah ada terdapat pengaruh latar belakang penulis terhadap karyanya. Setelah dilakukan analisis, penulis akan menarik kesimpulan.

2. Kritik

Tahapan kritik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyeleksi data yang sudah terkumpul dan memilah data yang sesuai dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar mengetahui data apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan penelitian.

3. Interpretasi

Setelah kritik, selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan.³⁴ Namun keduanya, dalam pandangan Kuntowijoyo, sebagai metode – metode utama dalam interpretasi.³⁵ Pertama analisis yaitu penguraian terhadap fakta yang didapatkan. Kedua, yaitu proses menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologi peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah.³⁶ Kerangka yang telah di rangkai, maka perlu pula penulis untuk menafsirkan dan

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 114.

³⁵ *Ibid.*, h. 100

³⁶ *Ibid.*, h. 103

mengkonstruksikannya menjadi masuk akal dari segi fakta dan harmonis, semuanya demi penjelasan yang tepat.

Buku *Militer dan Politik di Indonesia* Karya Harold Crouch merupakan karya yang menafsirkan atau menggambarkan bagaimana peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama tiga periode, empat bab pertama mengenai perluasan keterlibatan tentara dalam politik dan kedudukan mereka di masa Demokrasi Terpimpin, empat bab berikutnya berisi tentang periode transisi yaitu ketika angkatan darat di bawah pimpinan Jendral Soeharto setahap demi setahap menyisihkan presiden Soekarno. Kemudian dalam bab Sembilan hingga dua belas dimana pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh angkatan darat diteliti. Sehingga dalam buku ini secara keseluruhan banyak pembahasan mengenai peranan politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa pemerintahan orde baru.

Berkaitan dengan ini penulis menghubungkannya dengan buku-buku dan/atau penelitian lain yang mengkaji militer dan politik pada masa Pemerintahan Orde Baru. Penulis menghubungkannya dengan pendapat Leopold von Ranke yaitu mengkaji sejarah adalah mewujudkan peristiwa yang dikaji berdasar fakta aslinya, maksudnya adalah sejarah yang ditulis itu harus sebagaimana peristiwa itu terjadi dan karena itu harus berdasarkan sumber – sumber yang ada. Dalam hal ini, setelah dilakukannya pengkajian secara historiografi terhadap *Buku Militer dan Politik di Indonesia* Karya Harold Crouch, bahwa cerita dan penggambaran yang telah ditulis

berdasarkan fakta-fakta yang didapat langsung dari keadaan sebenarnya yang pernah terjadi, atau merupakan gambaran yang nyata Pemerintahan Orde Baru.

4. Historiografi

Penulisan adalah puncak dari penelitian, bisa pula disebut sebagai langkah akhir yang dilakukan. Penulisan tahap ini fungsinya adalah menyampaikan informasi kepada khalayak dalam mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang serta metode objek kajian terhadap perumusan yang diajukan.

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam bukunya *Militer dan Politik di Indonesia*, Harold Crouch memberikan gambaran yang mendalam mengenai hubungan antara militer dan politik selama masa Orde Baru. Crouch menjelaskan bahwa militer memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam pemerintahan. Menurutnya, militer tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam dunia politik.

Militer memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan politik, bahkan seolah-olah menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada urusan pertahanan atau keamanan, tetapi meluas hingga ke berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik dan ekonomi. Keberadaan militer yang begitu kuat dalam dua bidang ini menciptakan sebuah sistem kekuasaan yang sangat terpusat, di mana wewenang berada di tangan sekelompok kecil orang dan sering kali bersifat otoriter atau tidak memberikan ruang bagi demokrasi. Dalam sistem ini, militer memiliki peran sentral dalam mengendalikan arah kebijakan negara.

Pandangan Harold Crouch tentang militer dan politik pada masa Orde Baru dipengaruhi oleh *zeitgeist*, yaitu semangat zaman atau suasana umum yang berkembang pada masa itu, serta oleh kondisi sosial dan budaya di Indonesia saat itu. Semangat zaman yang dimaksud di sini mencakup situasi politik global dan nasional yang mempengaruhi bagaimana Crouch memahami peran militer. Analisis Crouch

tentang militer pada masa Orde Baru tidak bisa dipisahkan dari pengaruh konteks global Perang Dingin dan keadaan dalam negeri yang otoriter. Ia memahami bahwa struktur masyarakat Indonesia pada saat itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan militer yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan negara.

Karya Harold Crouch mencerminkan bagaimana situasi sosial dan politik pada masa Orde Baru berpengaruh besar terhadap cara dia menganalisis hubungan antara militer dan politik. Crouch tidak hanya menuliskan sejarah sebagai rangkaian fakta atau peristiwa, tetapi juga menafsirkannya sesuai dengan konteks zaman yang ia pelajari. Dengan kata lain, bukunya tidak sekadar menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang berlaku pada saat itu.

Oleh karena itu, karya Crouch ini bukan hanya menjadi salah satu referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang periode Orde Baru di Indonesia, tetapi juga mengajarkan kepada pembaca tentang bagaimana sejarah ditulis. Karya ini mengingatkan bahwa sejarah tidak selalu bebas dari pengaruh luar, seperti pandangan politik atau budaya dari masa penulisannya. Buku Crouch memberikan sudut pandang kritis tentang cara kita memahami dan menafsirkan sejarah, karena sejarah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang ada pada saat penulis melakukan analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. (1985) *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia.
- Admin LSI. (2024). "Obituari Prof. Dr. Harold Crouch". Dikutip dari <https://www.lsi.or.id/post/obituari-prof-dr-harold-crouch>, diakses pada 1 Mei 2024.
- Ali, M. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Alphonsius, R. E., et al. (2020). "Dwi Fungsi ABRI dalam Konflik Internal PDI 1976-1998". *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 101-115.
- Anggleni, A. (2023). Birokrasi sipil dan militer: Dominasi aktor militer dalam tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Anwar. (2018). "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia". *ADABIYA*, 20(1), 75-89.
- Aspinall, E. (2024). "Vale Emeritus Professor Harold Crouch". Dikutip dari <https://indonesiainstitute.anu.edu.au/content-centre/article/news/vale-emeritus-professor-harold-crouch>, diakses pada 11 Mei 2024.
- Aspinall, E., & Crouch, H. A. (2003). *The Aceh Peace Process: Why It Failed*. East-West Center. ISBN 978-1-932728-00-2.
- Azwar, A., & Suryanan, M. J. (2021). "Dwifungsi ABRI dari Masa ke Masa". *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 45-59.
- Beddy, M. I. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiyanto. (2023). "Mengenal Karya Ilmiah". Dikutip dari <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132310007/pendidikan/mengenal-karya-ilmiah-pengantar-kuliah-pki>, diakses pada 11 Agustus 2023.
- Crouch, H. A. (1964). *The Melbourne Peace Movement: A Study of the Policies and Performance of the A.N.Z Congress for International Cooperation and Disarmament*. Dissent <https://books.google.com/books?id=Yho1HAAACAAJ>.

- _____, (1966). *Trade Unions and Politics in India*. Manaktalas.
<https://books.google.com/books?id=q8AyAAAAMAAJ>.
- _____, (1985). *Economic change, social structure, and the political system in Southeast Asia: Philippine development compared with the other ASEAN countries*. Institute of Southeast Asian Studies ISBN 978-9971-988-23-4.
<https://books.google.com/books?id=ES15CNHhF8EC>.
- _____, (1996). *Government and Society in Malaysia*. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-3218-7.
<https://books.google.com/books?id=HNEGTjlwMpEC>
- _____, *Political Reform in Indonesia After Soeharto*, Singapore: ISEAS, 2010
- _____, 1999, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Emmerson, D. K. (Ed.). (2001). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*. Jakarta: Gramedia-Asia Foundation Indonesia.
- Ensiklopedia Harold Crouch, dikutip dari <https://encyclopedia.pub/entry/38677> pada 9 Mei 2024
- Fattah, Abdoel. (2005). *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKiS
- Finer, Samuel. (2006). *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics* (4th Printing). New Brunswick and London: Transaction Publishers.
- Francisco, B. H. (2003). *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan*. Yogyakarta: Buku Baik.
- Gotschalk, L. (2006). *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hanan, K. J. (1998). The Indonesian military and the anti-communist campaign: 1965-1966. *Journal of Southeast Asian Studies*, 29(1), 27-48.
- Haripin, M., Priamarizki, A., & Indrabayu, K. (2020). *The Army and Ideology in Indonesia*. Taylor and Francis. Dikutip dari https://www.google.co.id/books/edition/The_Army_and_Ideology_in_Indonesia/aIYr1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Military+Politics+and+Democratization+in+Indonesia+Marcus+Mietzner&pg=PP18&printsec=frontcover.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

- Institute of Southeast Asian Studies. (n.d.). *Domestic Political Structures and Regional Economic Co-operation*. ISBN 978-9971-902-80-3. Diakses dari: <https://books.google.com/books?id=EHYxfOv9DEoC>.
- Jenkins, D. (2010). *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (T.t.). “Beberapa Persoalan Sekitar Sejarah Indonesia & Segi-segi Struktural Historiografi Indonesia”. *Lembaran Sejarah*, Universitas Gadjah Mada dalam Lubis, N. H. (2002). “Kontroversi Tentang Naskah Wangsakerta”. *Lembaran Sejarah*, Volume 14, No. 1.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (1986). *Demokrasi dan proses politik*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, Nina Herlina. (2000). *Historiografi Barat*. Bandung: Satya Historika.
- Mackie, J. A. (2008). *Indonesia: From Soeharto to the reformation*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Magee, G. A. (2011). *Zeitgeist, The Hegel Dictionary*. Continuum International Publishing Group.
- Markoni. (2014). "Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan". *Sekolah Tinggi Hukum Militer*, 2(1), 33-47.
- Matanasi, Petrik. “Rezim Orde Baru Soeharto melarang beredarnya terjemahan buku seorang peneliti militer bernama Harold Crouch alias Haris Amir.” Dikutip dari <https://tirto.id/baca-buku-pengantar-sosiologi-kamu-belajar-marxis-ya-ddUV> pada 1 Mei 2024
- Mietzner, Marcus. (2024). “Mengenang Harold Crouch”. Dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/mengenang-harold-crouch>, diakses pada 10 Mei 2024.
- Misol, L. (2006). *Harga selangit: Hak asasi manusia sebagai ongkos kegiatan ekonomi pihak militer Indonesia*. New York: Human Rights Watch.
- Nasution, J. (1971). *Kekaryaan ABRI: Seruling Masa*. Jakarta: Rajawali.
- Notosusanto, Nugroho. (1968). *Sedjarah dan Hankam*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam.

- _____. (1984). *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Padiatra, Aditia Muara. (2020). *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: JSI Press.
- Panuntun, B. F. (2022). *Pengaruh Militer pada Sejarah Nasional Indonesia: Studi Historiografi Terhadap Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Karya Nugroho Notosusanto*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Saalino, E. (2019). *Hukum Militer di Indonesia*. Ponorogo: Uwaus Inspirasi Indonesia.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Samuel, Peter, and Harold Crouch. (1964). *The Peace Movement* (Dissent pamphlet). Melbourne: Dissent Trust. Diakses dari: <https://books.google.com/books?id=wJjNHAAACAAJ>
- Sanit, A. (1986). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Pres.
- Setiyono, E. (2015). *Kekuasaan dan kekuatan: Militer dalam politik Orde Baru*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Singh, B. (1996). *Dwi Fungsi ABRI: Asal Usul, Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan* (terj. Robert Hariono Imam). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simatupang, T. B. (1981). *Pelopop dalam Perang, Pelopor dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soegeng Ysh. (2016). *Prosedur dan Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafutta, Wira. (2016). "Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto Dalam Pengajaran Sejarah Di Sma (1983-1985)" dalam *Journal UNY* 12 (1).
- Tempo. (2022). *Bisnis militer Indonesia di era Presiden Soeharto*. Jakarta: TEMPO Publishing.

The Australian National University, “Vale Harold Crouch Emeritus Professor”, dikutip dari artikel <https://psc.bellschool.anu.edu.au/experts-publications/experts/vale-harold-crouch> pada 10 Mei 2024

Winamo, B. (2008). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Yatim, Badri. (1997). *Historiografi Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Zakaria bin Haji Ahmad; Harold A. Crouch (1985). *Military-civilian relations in South-East Asia*. Oxford University Press.
<https://books.google.com/books?id=xoBuAAAAMAAJ>.

Zed, M. (1984). *Pengantar Studi Historiografi*. Padang: Universitas Andalas.

_____. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.

Zulmiyetri, et.all, 2020, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Media